

**JURNAL SKRIPSI**

**PERANAN UNAMID DALAM MENGATASI KONFLIK  
BERSENJATA ANTARA KELOMPOK PEMBERONTAK DI  
DARFUR DENGAN PEMERINTAHAN SUDAN**



**Diajukan Oleh :**

**PETRUS KRISOLOGUS JULLIO SAMBI SEE**

**NPM : 120511005**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL SKRIPSI**

**PERANAN UNAMID DALAM MENGATASI KONFLIK  
BERSENJATA ANTARA KELOMPOK PEMBERONTAK DI  
DARFUR DENGAN PEMERINTAHAN SUDAN**



**Diajukan oleh :**

**PETRUS KRISOLOGUS JULLIO SAMBI SEE**

**NPM : 12011005**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Dosen Pembimbing**

**H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# **PERANAN UNAMID DALAM MENGATASI KONFLIK BERSENJATA ANTARA KELOMPOK PEMBERONTAK DI DARFUR DENGAN PEMERINTAHAN SUDAN**

**Petrus Jullio See**  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email : [seejullio@yahoo.com](mailto:seejullio@yahoo.com)

## ***Abstract***

*Darfur armed conflict, began in February 2003. In 1983, the South led by the movement of the People's Liberation Sudan or (SPLM) Sudan People's Liberation Movement, and has been armed, Liberation Army of South Sudan (SPLA) Sudan People's Liberation Army, joined the uprising when the Sudanese government cancel the agreement autonomy arrangements. At least 1.5 million people have lost their homes and more than 4 million people have been displaced for 22 years due to guerrilla warfare. In this legal writing, the researcher tries to examine and analyze the issue of how the role of UNAMID in resolving the armed conflict between rebel groups in Darfur by the Sudanese government. The data used is the primary legal materials consisting of Charter of the United Nations, Charter of The Organization of African Unity, Constitutive act of the African Union, United Nations Security Council 1769. as well as secondary data which consists of books, journals, articles, theses, and internet-related research topics. United Nations / African Union Hybrid Operation Mission in Darfur (UNAMID), was formed on July 31, 2007, and acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations decided by the UN Security Council resolution number 1769. Based on the results of research and analysis, the researcher concluded that the formation of a specialized agency of UN and African Union that UNAMID United Nations Mission In Darfur has been going according to the mandate given even though there are many obstacles both for external and internal factors.*

***Keywords: Role of United Nations / African Union Hybrid Operation Mission in Darfur (UNAMID), Armed Conflict, Combatants, Sudan Government and Darfur***

## 1. PENDAHULUAN

Mengenai definisi dari Organisasi Internasional itu sendiri belum terdapat kesepakatan. Bila diartikan sebagai wadah bagi negara-negara untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama, kita mendapatkan pengertian Organisasi Internasional yang sempit. Jika diartikan sebagai wadah bagi negara-negara untuk mengadakan kerjasama, dimana wadah tersebut mempunyai wewenang atas negara anggota, pengertiannya menjadi sedikit luas. Organisasi Internasional merupakan wadah bagi negara-negara untuk menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerja sama yang sifatnya koordinatif maupun subordinatif, karena sulitnya mendefinisikan Organisasi Internasional, jalan yang dapat diberikan adalah menunjukkan ciri-ciri Organisasi Internasional. Seperti yang dikemukakan Leroy Bennet, Organisasi Internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. *A permanent organization to carry on a continuing set of functions;*
2. *Voluntary membership of eligible parties;*
3. *Basic instrument stating goals, structure, and methods of operation;*
4. *A broadly representative consultative conference organ;*
5. *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research and information functions.*

Status organisasi dalam hukum Internasional adalah :

- a. Sebagai subjek hukum Internasional.
- b. Membantu pembentukan hukum Internasional
- c. Sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan

yang dihadapi oleh anggotanya

- d. Sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum Internasional ditaati.

Setelah mengetahui secara singkat mengenai Organisasi Internasional selanjutnya saya akan membahas mengenai Organisasi Internasional yang bersifat publik yaitu Organisasi Kesatuan Afrika (OAU) atau biasa dikenal dengan nama Uni-Afrika. Uni-Afrika atau dikenal dengan Organisasi Kesatuan Afrika didirikan pada tahun 1963. Salah satu tujuan didirikannya *African Union* (AU) adalah untuk memperkenalkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua Afrika. Di dalam Pasal 3 ayat (4) *Charter of The Organization of African Unity* mengenai prinsip dari *African Union* (AU) menyatakan bahwa:

*"Peaceful settlement of disputes by negotiation, mediation, conciliation or arbitration."*

(Penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase).

Dijelaskan kembali dalam Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity* menetapkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan membentuk komisi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang para anggotanya dan fungsinya diatur secara khusus dalam protokol terpisah sebagai bagian integral dari *Charter of The Organization of African Unity*. Protokol tersebut ditandatangani di Kairo pada tanggal 21 Juli 1964 dan memuat ketentuan prosedur yang rinci bagi penyelesaian sengketa diantara para anggota *African Union* (AU).

Anggota komisi ini terdiri dari 21 wakil dari negara anggota dan dipilih oleh Majelis Umum untuk periode lima tahun. Setiap sengketa dapat diajukan kepada Komisi oleh salah satu pihak terkait atau oleh kepala negara/menteri yang mewakili pemerintah suatu negara anggota. Komisi dapat menolak menangani suatu kasus sengketa apabila permasalahannya dianggap berada di luar wewenang Komisi. Persetujuan dari salah satu pihak yang bersengketa diperlukan sebelum Komisi dapat melaksanakan fungsinya.

Adapun isi dari Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity* adalah sebagai berikut:

*“Member States pledge to settle all disputes among themselves by peaceful means and, to this end decide to establish a Commission of Mediation, Conciliation and Arbitration, the composition of which and conditions of service shall be defined by a separate Protocol to be approved by the Assembly of Heads of State and Government. Said Protocol shall be regarded as forming an integral part of the present Charter.”*

(Negara-negara anggota berjanji untuk menyelesaikan semua perselisihan di antara mereka sendiri dengan cara-cara damai dan, untuk tujuan ini memutuskan untuk membentuk sebuah Komisi Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, komposisi dan kondisi akan layanan didefinisikan oleh Protokol terpisah harus disetujui oleh Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan. Isi Protokol akan dianggap sebagai bentuk bagian integral dari piagam yang sekarang).

Berdasarkan dari Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity*

tersebut maka dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap negara anggota dari *African Union* (AU) harus dapat menyelesaikan setiap sengketanya dengan prinsip damai dan tidak menggunakan kekerasan. Dalam *Constitute act of the African Union* pasal 4 poin (h) *African Union* mempunyai hak untuk campur tangan dalam suatu negara anggota sesuai dengan keputusan Majelis sehubungan dengan keadaan, yaitu: kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Isi dari Pasal pasal 4 poin (h) *Constitute act of the African Union* adalah sebagai berikut:

*“The right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity.”*

(Hak Uni Afrika/*African Union* untuk campur tangan dalam suatu negara Anggota sesuai dengan keputusan Majelis sehubungan dengan keadaan, yaitu: kejahatan, perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan).

Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB mencantumkan asas penyelesaian sengketa dengan cara damai. Isi dari Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut:

*“Seluruh anggota harus menyelesaikan sengketa dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.”*

Asas ini erat sekali kaitannya dengan tujuan utama PBB yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB yaitu:

*“Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian”.*

Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB menyatakan:

*“Organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional.”*

Hal ini merupakan suatu yang tidak lazim sebab biasanya hanya anggota-anggota saja yang harus taat pada asas-asas organisasi. Namun inilah suatu keistimewaan yang dimiliki organisasi internasional universal seperti PBB. Kewajiban ini diimbangi oleh hak-hak negara bukan anggota untuk meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum terhadap suatu perselisihan dimana negara bersangkutan terlibat. Seperti diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Piagam PBB sebagai berikut: *“Negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai suatu pertikaian apabila sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pada penyelesaian*

*secara damai seperti tercantum dalam Piagam ini.”*

Sebagaimana disebutkan bahwa Pasal 2 ayat (7) mencantumkan asas yang terkenal dengan sebutan *The Principle of Non-Intervention* atau asas untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri suatu negara. Asas ini merupakan konsekuensi yang logis dari asas pertama piagam yaitu bahwa PBB mempunyai kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara masing-masing anggota. Akan tetapi dipihak lain nampaknya asas ini agak longgar karena seakan-akan tidak terlalu menuntut dengan ketat negara-negara anggota untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Piagam, padahal asas yang kedua justru mengharapkan dengan sangat adanya itikad baik dan kejujuran para anggota untuk menjalankan segala kewajiban yang timbul dari piagam, karena pada Pasal 2 ayat (7) ini mengandung suatu pengecualian yaitu kewenangan PBB melalui Dewan Keamanan untuk menggunakan tindakan-tindakan kekerasan seperti yang dimaksud dalam Bab VII Piagam PBB.

Bunyi Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB : *“Tidak ada suatu ketentuan-pun dalam piagam ini yang memberi kuasa pada perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan suatu anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti yang tercantum dalam Bab VII Piagam.”*

Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan dan berdiri sendiri menjadi

negara merdeka sejak 9 Juli 2011, sebagai hasil referendum bulan Januari 2011. Proses pemisahan itu berjalan damai, tetapi setelah itu kedua negara bersitegang dalam berbagai permasalahan yang tak kunjung terselesaikan, termasuk soal minyak bumi, utang luar negeri, dan kekerasan yang terjadi di sekitar garis perbatasan yang tidak jelas. Sudan menuduh Sudan Selatan mendukung pemberontak di wilayah Sudan, sedangkan Sudan Selatan menuduh Sudan membiayai pemberontak di wilayahnya. Salah satu pangkal konflik terbesar adalah soal kekayaan minyak. Tiga perempat cadangan minyak Sudan sebelum terbagi dua kini berada di kawasan Sudan Selatan. Akan tetapi, Sudan Selatan membutuhkan dua jalur pipa yang melewati wilayah Sudan sebagai satu-satunya sarana menyalurkan minyaknya ke pelabuhan ekspor di Laut Merah. Sudan menuduh Sudan Selatan tidak mau membayar ongkos sewa jalur pipa minyak ini. Sebaliknya, Sudan Selatan menuduh Sudan mencuri minyaknya yang dialirkan melalui pipa itu.

Sudan terbagi menjadi 2 negara yaitu Sudan dan Sudan Selatan hal ini diakibatkan oleh perang sipil antara dua wilayah yaitu wilayah Utara dan Selatan. Ketika Sudan telah bersiap untuk kemerdekaannya dengan bergabung bersama Inggris dan aturan Mesir pada tahun 1956, pemimpin dari selatan Sudan menuduh bahwa pemerintahan Sudan yang baru di Khartoum telah mundur dari janjinya untuk menciptakan sistem federal, dan mencoba untuk memasukkan identitas Islam dan Arab pada negara Sudan. Pada tahun 1955, Pasukan tentara selatan memberontak, memicu terjadinya perang saudara antara bagian

selatan, yang dipimpin oleh Anya Nya sebuah pergerakan gerilya, dengan pemerintah Sudan. Konflik tersebut hanya berakhir ketika dibuat perjanjian damai Addis Ababa pada tahun 1972 tentang pemerataan otonomi dan kesetaraan antara wilayah utara dan selatan di Sudan. Tetapi, pada tahun 1983, wilayah Selatan yang dipimpin oleh pergerakan Kemerdekaan Rakyat Sudan atau (SPLM) *Sudan People's Liberation Movement* dan telah dipersenjatai, Pasukan Pembebasan Sudan Selatan (SPLA) *Sudan People's Liberation Army*, bergabung dalam pemberontakan ketika pemerintahan Sudan membatalkan perjanjian pengaturan otonomi.

Paling sedikit 1,5 juta orang telah kehilangan tempat tinggal mereka dan lebih dari 4 juta orang mengungsi selama 22 tahun disebabkan oleh perang gerilya. Banyak masyarakat dari Sudan Selatan yang melarikan diri, sisanya menuju ke utara atau negara-negara tetangga, dimana banyak yang menetap. Konflik tersebut akhirnya berakhir ditahun 2005 dengan Perjanjian Damai Luas atau *Comprehensive Peace Agreement*, dimana bagian selatan diberikan otonomi daerah dengan jaminan perwakilan dalam pembagian kekuasaan pemerintah nasional. Perjanjian ini juga disediakan untuk terjadinya sebuah referendum di bagian selatan mengenai kemerdekaan pada tahun 2011, dimana 99 % masyarakat Sudan Selatan memilih untuk memisahkan diri dari Sudan.

Telah dikatakan sebelumnya bahwa PBB dan badan bentukan khusus PBB dan Uni-Afrika, yaitu (UNAMID) yang dibuat khusus untuk menangani masalah yang terjadi di Darfur mengalami hambatan. Hal

inilah yang nanti akan penulis kaji terkait keterlibatan UNAMID, Pemberontak, dan Pemerintah Sudan sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan UNAMID dalam mengatasi konflik bersenjata antara kelompok pemberontak di Darfur dengan pemerintahan Sudan.

#### Tinjauan Pustaka

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain; atau dapat juga tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa, jadi peranan dapat dikatakan sebagai tindakan atau bagian seseorang atau kelompok dalam peristiwa tertentu.
- b. UNAMID adalah Misi Gabungan antara PBB dan Uni-Afrika di Darfur, Sudan. United Nations Mission In Darfur (UNAMID) ini disebabkan oleh peperangan panjang antara para pemberontak dengan pemerintahan Sudan, dimana telah mengakibatkan ribuan orang tewas dan jutaan masyarakat Sudan mengungsi.
- c. Konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan; ketegangan antara dua pihak, pertentangan antara dua kekuatan kekuatan.
- d. Bersenjata adalah menggunakan senjata, membawa senjata
- e. Kelompok Pemberontak adalah kumpulan orang dan sebagainya; golongan tentang aliran, tingkatan atau lapisan masyarakat, atau profesi yang melawan atau menentang sesuatu yang sah atau berkuasa.

- f. Darfur adalah sebuah negara bagian di Sudan yang terletak di bagian barat Sudan dengan pusat kota yaitu Al Fashir dan Nyala.
- g. Sudan adalah sebuah negara yang terletak di Afrika yaitu di bagian Afrika Utara. Jumlah penduduk Sudan adalah sekitar 41 juta jiwa.. Kelompok-kelompok etnis di Sudan adalah: Kulit Hitam 52%, Arab 39%, Beja 6%, Orang Asing 2%, dan yang lainnya 1%. Bahasa resmi negara adalah bahasa Arab, meskipun bahasa Inggris dan bahasa suku masih banyak digunakan. Ibukotanya adalah Khartoum.

## 2. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan “law in the book” dan penelitian ini berdasarkan pada penelitian suatu norma yang melandasi suatu tindakan hukum tertentu beserta dengan studi kasus yang terjadi pada suatu teritori atau wilayah tertentu.

### b. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

#### 1) . Bahan hukum Primer :

- a. Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa
- b. *Charter of The Organization of African Unity*
- c. *Constitutive act of the African Union*
- d. *United Nations Security Council* 1769



- 2). Bahan hukum Sekunder
  - a. Buku-buku Hukum Organisasi Internasional
  - b. Buku-buku Hukum Internasional
  - c. Jurnal
  - d. Website
  - e. Majalah dan Surat Kabar
- 3). Bahan hukum Tersier
  - Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - c. Cara Pengumpulan Data
    - 1). Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder.
    - 2). Wawancara dengan pejabat di kantor UNIC (United Nations Information Center).
    - 3). Wawancara dengan staf Kedutaan Besar Sudan di Jakarta.
  - d. Metode Analisis Data
 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dengan narasumber sehingga didapatkan suatu gambaran tentang peranan UNAMID dalam mengatasi konflik bersenjata antara kelompok pemberontak di Darfur dengan pemerintahan Sudan.
  - e. Metode Berpikir
 

Metode berpikir dari penelitian ini adalah deduktif mengambil kesimpulan secara Deduktif. Artinya penulis menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus atau melihat alur berpikir dari sesuatu yang

umum kemudian ditarik alur berpikir menjadi alur berpikir khusus.

### 3. HASIL PENELITIAN

Konflik yang terjadi di negara Sudan merupakan konflik umum yang terjadi di setiap wilayah negara manapun. Penyebab konflik terjadi biasanya karena adanya suatu perbedaan dan diskriminasi, terutama konflik perbedaan agama yang sejatinya setiap agama mengajarkan umatnya untuk saling menghormati dan mengasihi sesama pemeluk agama lain. Konflik lain yang biasa terjadi di wilayah Sudan adalah konflik kesukuan atau ras, konflik ini tidak jauh berbeda dengan konflik agama yang sering terjadi di berbagai wilayah di benua Afrika. Konflik yang terjadi di Sudan begitu beragam, selain Sudan tidak menjadi sebuah negara dengan wilayah terbesar di benua Afrika, konflik yang terus berkejolak di Sudan mengakibatkan Sudan menjadi negara Afrika yang dikategorikan negara miskin dan terbelakang karena Sudan tidak mampu untuk mengolah sumber daya yang dimilikinya, dimana menimbulkan ketidakseimbangan proses pembangunan juga pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Selain itu, Sudan adalah salah satu negara termiskin di dunia dengan rakyat yang kerap diterpa bencana kelaparan. Konflik yang terjadi ini begitu rumit dan mengganggu tatanan kehidupan antara rakyat dan

pemerintah di Sudan. Keberlangsungan konflik ini sudah begitu lama dari awal Sudan Utara dikembangkan dan mengisolasi Sudan wilayah Selatan, dimana mereka melarang penduduk wilayah utara untuk masuk ke selatan. Di Selatan, mereka mencegah penyebaran Islam dan tradisi Islam pun malah memperkenalkan misionaris Kristen. Inggris pun membangun kesadaran identitas penduduk Sudan wilayah Selatan bahwa mereka adalah penduduk asli Afrika (yang berbeda dengan Utara), serta membangun pola pemerintahan tradisional di bawah pimpinan para syekh di Utara dan pemimpin suku di Selatan yang memberikan andil terhadap lemahnya sistem pemerintahan Sudan dikemudian hari.

Namun, kemerdekaan tersebut bukanlah hal yang mudah, diraih setelah konflik utara-selatan selama beberapa dekade yang menelan jutaan korban jiwa. Mayoritas perpecahan internal seringkali dapat ditemukan di berbagai Negara dalam Afrika. Bahkan, perpecahan internal ini tidak hanya sebatas perpecahan pada kesatuan rakyat sebuah negara, akan tetapi masuk kepada tingkatan konflik atau perang sipil/saudara. Perang saudara biasa terjadi akibat perbedaan paham antara kedua belah pihak, bahkan sampai konflik antar agama dan etnis yang tidak mampu hidup harmonis bersama dalam sebuah negara. Perpecahan internal yang terjadi di Sudan ada beberapa:

1. Sejak tahun 2003 Darfur, dimana pokok permasalahannya terletak pada meningkatnya gerakan-gerakan yang menentang pemerintahan pusat Omar Al-Bashiir. Terjadi *ethnic-cleansing* yang menghasilkan ratusan ribu warga meninggal, serta jutaan mengungsi ke negara tetangga.

2. Kasus antara Sudan Selatan dan Sudan Utara.

Latar belakang konflik ini disebabkan adanya ketidakadilan dalam pemerintahan pusat terhadap hak-hak warga di Sudan Selatan. Dari segi politik dan ekonomi, Sudan Selatan sering tidak dianggap dalam keputusan politik serta poliferasi ekonomi ke daerah tersebut, menyebabkan ketidaksetaraan lapangan pekerjaan dan perkembangan daerah. Sering pula terjadi eksploitasi di daerah Sudan Selatan oleh pemerintahan pusat yang berlokasi di Sudan Utara. Berbicara mengenai dua wilayah yang selalu memanas ini, tentu tidak terlepas dari sejarah konflik antar dua wilayah ini. Dimana konflik ini bermula dari konflik bersenjata antara pemerintah Sudan dan al-Harakah al-Sya'biyyah li al-Tahrir al-Sudan (Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan/SPLM).

Gerakan pembebasan ini memicu persoalan internal yang terjadi antar wilayah tersebut yang mana malah memperkeruh keadaan. Sejarah konflik internal antara Sudan Utara dan Sudan wilayah Selatan tidak hanya dimotivasi oleh sebab-sebab di atas, tapi juga yang telah disebutkan

berhubungan dengan diskriminasi ras dan agama oleh pemerintahan pusat. Sehingga dikatakan bahwa konflik antar-agama, sekaligus ras. Dari segi agama, daerah Sudan Utara memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dan mereka adalah ras Arab. Sedangkan di Sudan wilayah Selatan mayoritas penduduknya adalah Kristen dan ras kulit hitam.

Upaya yang telah dilakukan UNAMID

UNAMID telah melakukan berbagai upaya disamping menjaga perdamaian di Sudan, seperti :

#### Urusan Sipil UNAMID

##### a. Mandat dan peran Urusan Sipil di UNAMID

Bagian Urusan Sipil adalah komponen sipil di UNAMID yang bekerja ditingkat sosial, administratif dan politik sub-nasional level untuk memfasilitasi pelaksanaan mandat UNAMID dan untuk mendukung penduduk dan pemerintah dalam menciptakan dan memperkuat kondisi dan struktur kondusif untuk perdamaian yang berkelanjutan di Darfur. Tiga peran inti Urusan Sipil dalam mendukung mandat UNAMID meliputi:

1. Bagian Urusan Sipil adalah saluran untuk berkomunikasi prioritas dan persepsi berbagai sektor penduduk untuk misi, baik tentang UNAMID dan proses perdamaian Darfur.
2. Untuk menjamin perdamaian kondusif dan berkelanjutan, Urusan Sipil mengadakan dan memfasilitasi dialog antara kelompok kepentingan dan pemangku kepentingan; melakukan penjangkauan langsung ke penduduk (bekerja dengan aktor misi lain untuk

merancang dan menyampaikan pesan yang tepat dan konsisten); mendukung upaya pemerintah, administrasi asli dan kelompok masyarakat sipil yang mencari perdamaian dan rekonsiliasi; mengidentifikasi, melaksanakan dan memantau Proyek Dampak Cepat /*Quick Impact Projects* (QIPs); dan mempromosikan atau melindungi kepentingan yang telah dikecualikan, mengancam, kelompok-kelompok marjinal atau kelompok-kelompok minoritas.

3. Urusan Sipil berkontribusi pembentukan dan penguatan tata kelola yang sah dan perwakilan, serta menyediakan dukungan operasional untuk kegiatan Nasional, negara dan pemerintahan lembaga melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan bantuan dalam penataan lembaga pemerintahan negara dan transisi serta dialog mendukung antara berbagai sektor penduduk (termasuk aktor masyarakat sipil) dan pemerintah. Pada masing-masing peran diidentifikasi, pekerjaan Urusan Sipil mengambil bagian, mendukung dan menarik karya komponen lainnya UNAMID dan Tim Negara PBB (UNCT), serta selalu menyediakan informasi untuk memfasilitasi respon tingkat masyarakat.

#### Militer UNAMID

Perlindungan bagi warga sipil menjadi jantung bagi mandat pasukan PBB dan pasukan Helm Biru/*Blue Helmets* untuk menyediakan keamanan ditempat ini.

Semua personil militer yang bekerja dibawah pasukan *Blue Helmet* adalah anggota pertama dan utama dari tentara nasional negara masing-masing yang kemudian diperbantukan untuk bekerja bersama PBB. Militer

UNAMID memiliki lebih dari 97.000 personil berseragam PBB (Militer dan Polisi) yang berasal dari lebih 110 negara. Mereka datang dari negara-negara besar dan kecil, kaya dan miskin, Membawa budaya dan pengalaman yang berbeda, walaupun demikian mereka tetap bersatu dalam tekad mereka untuk meningkatkan perdamaian.

PBB telah mengerahkan personil militer untuk layanan dalam operasi perdamaian sejak tahun 1948 ketika Dewan Keamanan menyetujui penempatan pengamatan militer PBB ke Timur Tengah untuk memantau Perjanjian Gencatan Senjata antara Israel dan tetangga-tetangga Arabnya.

#### Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi UNAMID

Kegiatan *Disarmament, demobilization and reintegration (DDR)* adalah komponen penting untuk stabilisasi awal masyarakat, atas terobeknya komunitas masyarakat serta pembangunan jangka panjang mereka. DDR harus diintegrasikan ke dalam proses perdamaian dari seluruh perundingan perdamaian melalui perdamaian dan tindak kegiatan *peacebuilding* seperti di Timor-Leste.

1. Perlucutan senjata adalah mengoleksi, mendokumentasi, mengontrol dan membuang senjata, amunisi, bahan peledak dan senjata ringan dan berat dari pejuang dan seringkali dari penduduk sipil.
2. Demobilisasi adalah mengontrol kombatan aktif dari angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok, termasuk fase "reintegrasi" yang memberikan bantuan jangka pendek untuk mantan gerilyawan.
3. Reintegrasi adalah proses dimana mantan kombatan mendapatkan status

sipil dan mendapatkan pekerjaan yang berkelanjutan dan pendapatan. Ini adalah proses politik, sosial dan ekonomi yang terbuka, terutama yang terjadi di masyarakat di tingkat lokal.

Tujuan dari proses DDR ini adalah untuk memberikan kontribusi untuk keamanan dan stabilitas di lingkungan pasca-konflik sehingga pemulihan dan pembangunan dapat dimulai. DDR membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses politik dan perdamaian dengan menangani masalah keamanan yang muncul ketika mantan gerilyawan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan normal, selama masa transisi, ini penting karena hal ini terjadi dari masa konflik menuju masa perdamaian dan pembangunan.

#### Unit Penyetaraan Gender UNAMID

Satuan Penasehat Gender UNAMID mendapat mandatnya dari UNSCR-1769 (2007) dan UNSCR-2113 (2013) sedangkan untuk perempuan dari Resolusi Perdamaian dan Keamanan 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) dan 2122 (2013) khusus menangani dampak yang tidak proporsional dan dampak konflik pada perempuan dan anak perempuan. Resolusi ini memperkuat UNSCR-1325 yang telah menetapkan agenda peran penting perempuan dalam pencegahan dan resolusi konflik untuk pembangunan perdamaian dan untuk partisipasi bersama juga ada keterlibatan penuh pada tingkat pengambilan keputusan dalam resolusi konflik, juga pemeliharaan dan promosi perdamaian dan keamanan

internasional. Dalam misi ini, unit ujung tombak penasehat gender melaksanakan mandat misi termasuk kebijakan, perencanaan, prosedur dan pelaporan. Hal ini memerlukan kajian dan analisis kebijakan dan intervensi dari mandat misi dan kebutuhan prioritas yang sedang berlangsung, untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Darfur sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua bidang fungsional pekerjaan misi '. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas manajemen senior, gender dan staf UNAMID, penyediaan sarana kebijakan dan bantuan teknis untuk bagian dan komponen untuk memastikan bahwa mereka mempromosikan kesetaraan gender melalui rencana dan kegiatan kerja yang responsif, tindakan advokasi dan kebijakan dalam misi pada isu-isu gender, memantau dan melaporkan isu-isu yang berkaitan dengan gender (dalam dan luar misi), dan melaporkan pencapaian misi dari upaya pengarusutamaan gender dan peningkatan keseimbangan gender dalam misi kepegawaian. Fokus utamanya adalah pada peningkatan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan pemerintahan, dan perlindungan perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual dan berbasis gender, pemerataan akses perempuan terhadap layanan dan sumber daya dan sosial-ekonomi pemberdayaan perempuan.

## Program UNAMID untuk HIV dan AIDS

Yayasan kegiatan HIV dan AIDS di UNAMID dilakukan dalam operasi perdamaian menjaga didukung oleh UNSCR 1308 (17 Juli 2000) dan UNSCR 1983 (Juni 2011) untuk mencegah penularan HIV di kalangan pasukan perdamaian dan masyarakat sekitar dengan cara intervensi yang meningkatkan tingkat kesadaran tentang HIV pencegahan. Selain itu, ada Majelis Umum PBB Khusus HIV dan AIDS pada tanggal 27 Juni 2001 yaitu, PBB GA sesi khusus tentang HIV dan AIDS mengadopsi deklarasi komitmen yang menyerukan pada semua badan-badan PBB, organisasi regional dan internasional, serta organisasi non-pemerintah yang terlibat dengan penyediaan dan pemberian bantuan internasional untuk negara dan wilayah yang terkena dampak konflik, krisis kemanusiaan atau bencana alam, untuk menggabungkan sebagai hal yang mendesak pencegahan HIV dan AIDS, peduli dan elemen kesadaran dalam rencana dan program-program mereka dan memberikan kesadaran HIV dan AIDS dan pelatihan untuk personil mereka."

## Program UNAMID untuk Hak Asasi Manusia

UNAMID bagian Hak Asasi Manusia bertugas untuk memonitor, menyelidiki, membuat peringatan dini dan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan berbasis gender seksual dan pelanggaran. Selanjutnya, bagian ini secara teratur

melakukan pemantauan peradilan khusus menangani impunitas, meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan lembaga peradilan dan kunci mitra dalam negeri, dan memberikan dukungan spesial Badan Khusus Dewan HAM/ *Human Rights Council*, seperti ahli independen untuk situasi hak asasi di Sudan. Bagian Hak Asasi Manusia ini dilakukan dengan melibatkan mitra internasional, gerakan bersenjata, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan termasuk Badan PBB untuk mengatasi hak asasi manusia dan Perlindungan kekhawatiran Sipil.

Perlindungan Penduduk Sipil, selanjutnya memantau dan memastikan dokumentasi yang tepat waktu dan pelaporan pelanggaran hak asasi manusia.

#### Perlindungan Penduduk Sipil/ *The Protection Of Civilians*

Perlindungan Penduduk Sipil merupakan mandat inti UNAMID . Dalam hal ini, POC (*The Protection Of Civilians*)/ HLS memegang penting dan kritis, sebagai penasihat dan berbagi informasi yang terkait dengan masalah perlindungan warga sipil di Darfur, baik secara horizontal, dalam komponen UNAMID dan bagian-bagian lainnya, juga secara vertikal, dengan kepemimpinan misi senior dan lapangan- Kantor tingkat Sektor dan tim setempat, serta juga dengan negara Tim PBB dan negara Tim Kemanusiaan / *United Nations Country Team and Humanitarian Country Team* (UNCT / HCT). Selanjutnya, POC / HLS bekerja untuk memperkuat struktur koordinasi UNAMID-UNCT dalam rangka untuk memaksimalkan dampak kolektif dan individual dari badan-badan PBB dan perlindungan

UNAMID dari kegiatan kemanusiaan di Darfur. Dalam hal ini, POC / HLS adalah titik masuk untuk interaksi misi dengan mitra UNCT / HCT, dan memegang kunci penting dalam memfasilitasi permintaan bantuan logistik oleh UNAMID, termasuk untuk penyediaan asisten dalam kaitannya dengan pemberian bantuan kemanusiaan dan pelaksanaan misi.

#### Kebijakan Politik

Bagian Urusan Politik memimpin UNAMID dalam pelaksanaan keseluruhan perjanjian damai yang bertujuan untuk membawa penyelesaian politik untuk konflik di Darfur. Kegiatan utama Bagian Urusan Politik adalah sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan Doha Dokumen untuk Perdamaian di Darfur (DDPD) dan perjanjian berikutnya, dan membuat rekomendasi, yang sesuai;
2. Meninjau dan mengevaluasi perkembangan politik serta keamanan, kemanusiaan dan ekonomi di Darfur;
3. Bertindak sebagai kontak Misi ini utama untuk pihak dalam konflik, dan berinteraksi erat dengan pihak penandatanganan DDPD pada tertinggi dan tingkat kerja untuk memajukan pelaksanaan Dokumen Doha;

#### Program UNAMID untuk Air dan Sanitasi

Memahami bahwa kelangkaan air adalah salah satu penyebab utama konflik di Darfur, UNAMID telah melakukan sejumlah besar proyek-proyek yang bertujuan untuk membantu masyarakat pedesaan dan perkotaan di wilayah akses ke sumber daya yang tak ternilai ini. Upaya baru termasuk membantu untuk mengatur sebuah konferensi internasional atas air, menyatukan lebih dari 200 ahli

dalam penggunaan air dan distribusi serta memimpin spesialis pengembangan dan donor darah di Khartoum pada 27 Juni 2011. Ini adalah upaya internasional untuk membangun sebuah sistem pengairan yang inovatif dan sistem pelayanan berkelanjutan untuk semua masyarakat di Darfur.

#### Program Relawan PBB di UNAMID

*The United Nations Volunteers Programs* secara resmi diluncurkan di UNAMID pada Januari 2008. Program ini sudah merupakan komponen penting dari Misi PBB di Sudan (UNMIS), dengan kehadiran 56 Relawan PBB dikerahkan di Darfur, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Sebagai bagian dari hubungan kolaboratif dekat bahwa program UNV telah berkembang dengan United Nations Peacekeeping (DPKO), Relawan PBB menjadi aset berharga bagi pelaksanaan mandat UNAMID ini, penyaluran ke Darfur pengalaman dan profesionalisme ratusan Relawan PBB, yang mencakup semua bidang pekerjaan, membuat kontribusi signifikan untuk perdamaian dan pembangunan di Darfur. Hingga November 2014, ada 295 Relawan PBB melayani dengan UNAMID.

Dapat dilihat bahwa peran UNAMID di Darfur tidak hanya mencakup melindungi warga sipil saja, namun juga mencakup kebutuhan mereka dan tingkat keamanan Darfur juga. Upaya yang telah dilakukan UNAMID menurut penulis telah sesuai dengan mandat yang diberikan kepada UNAMID oleh Perserikatan bangsa-bangsa dengan bertindak dibawah Piagam PBB Bab VII yang diputuskan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB

nomor 1769 dimana resolusi menjadi salah satu dasar berdirinya UNAMID. UNAMID telah melakukan tugasnya dengan baik walaupun masih banyak kendala yang dihadapi.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian mengenai Peranan UNAMID dalam mengatasi konflik bersenjata antara kelompok pemberontak di Darfur dengan pemerintahan Sudan, diperoleh kesimpulan bahwa badan khusus bentukan PBB dan Uni Afrika yaitu UNAMID *United Nations Mission In Darfur* telah berjalan sesuai mandat yang diberikan walaupun terdapat banyak halangan baik itu karena faktor eksternal maupun internal. Dari faktor internal seperti keterlambatan pengiriman bantuan pasukan negara kontribusi, pasukan bantuan dari negara-negara yang berkontribusi yang tidak mendengarkan perintah atasan dan memulangkannya untuk mengganti dengan pasukan yang baru, informasi yang katanya ditutup-tutupi oleh pejabat UNAMID ataupun PBB sedangkan faktor eksternal adalah ketidakterbukaan pemerintah Sudan dalam memberikan informasi, kekurangan sarana dan prasarana dalam misi, kekurangan alat-alat persenjataan, tidak ada kerjasama yang baik antara pemerintah Sudan dan UNAMID dan yang lainnya.

#### 5. REFERENSI

##### Buku :

Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung

Gamal Komandoko, 2010, *Ensiklopedia Pelajar Dan Umum*, Penerbit Pustaka Widyatama, Yogyakarta

J. G. Starke, 1977, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi X (Edisi Bahasa Indonesia), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung

Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

T.O. Elias, 1974, *The Modern Law of Treaties*, Oceana Publications, New York

Thoriqul Izzah, 2004, *Negeri-negeri Muslim yang Terjajah*, Pustaka Thoriqul Izzah Cetakan I, Bogor

Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin, 2010, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta

#### **Peraturan Perundang-Undangan / Konvensi Internasional:**

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa  
*Charter of The Organization of African Unity*  
*Constitutive act of the African Union*  
*United Nations Security Council 1769*

#### **Artikel/Jurnal:**

Colum Lynch "Inside the U.N's failed Darfur mission" The Week magazine, 15 April 2014.

#### **Tesis :**

Gita Arja Pratama, 2010, *Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan African Union (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-Internasional di Darfur-Sudan*, Universitas Lampung.

#### **Kamus:**

Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

#### **Website :**

<http://www.bbc.com/news/world-africa-14019208> diakses pada tanggal 07 Maret 2016

<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49952#.VuDaUX19600> diakses pada tanggal 08 Maret 2016

<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53311#.VuDapn19600> diakses pada tanggal 08 Maret 2016

<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/background.shtml> diakses pada tanggal 20 Maret 2016

<http://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 21 Maret 2016

<https://unamid.unmissions.org/about-unamid-1> diakses pada tanggal 26 Maret 2016

<http://www.darfurdevelopment.org/node/2> diakses pada tanggal 03 April 2016

<http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/sudan/sdland.htm> diakses pada tanggal 05 April 2016

<http://unicjakarta.org/2015/02/20/konflik-di-darfur-memaksa-ribuan-melarikan-laporan-kantor-kemanusiaan-pbb/> diakses pada tanggal 14 April 2016



<http://unic-jakarta.org/2014/05/07/di-sudan-selatan-sekretaris-jenderal-pbb-mohon-perdamaian-saat-saingan-politik-setuju-untuk-bertemu-dan-berbicara/#more-2215> diakses pada tanggal 14 April 2016

<http://internasional.kompas.com/read/2011/01/07/07394389/Pusaran.Konflik.Sudan> diakses pada tanggal 18 April 2016

<http://health.kompas.com/read/2012/02/29/02521135/konflik.sudan.makin.panas> diakses pada tanggal 18 April 2016

<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/background.shtml#> diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t22355.pdf> diakses pada tanggal 30 Juli 2016

<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/mandate.shtml> diakses pada tanggal 04 Agustus 2016

<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/facts.shtml> diakses pada tanggal 10 Agustus 2016

<http://unamid.unmissions.org/unamid-facts-and-figures> diakses pada tanggal 17 Agustus 2016

<http://www.bbc.com/news/world-africa-14095114> diakses pada tanggal 20 Agustus 2016

<http://www.rgs.org/OurWork/Schools/Teaching+resources/Key+Stage+3+resources/Africa+A+contine+nt+of+contrasts/Conflict+in+Sudan.htm> diakses pada tanggal 21 Agustus 2016

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7039360.stm> diakses pada tanggal 25 Agustus 2016

[http://unamid.unmissions.org/sites/default/files/ddpd\\_english.pdf](http://unamid.unmissions.org/sites/default/files/ddpd_english.pdf)

diakses pada tanggal 01 September 2016

<http://unamid.unmissions.org/civil-affairs> diakses pada tanggal 01 September 2016

<http://unamid.unmissions.org/military> diakses pada tanggal 01 September 2016

<http://unamid.unmissions.org/disarmament-demobilization-and-reintegration-ddr> diakses pada tanggal 01 September 2016

<http://unamid.unmissions.org/gender-advisory-unit> diakses pada tanggal 03 September 2016

<http://unamid.unmissions.org/hiv-aids> diakses pada tanggal 03 September 2016

<http://unamid.unmissions.org/human-rights> diakses pada tanggal 03 September 2016

<http://unamid.unmissions.org/humanitarian-protection-strategy-coordination-0> diakses pada tanggal 03 September 2016

<http://unamid.unmissions.org/political-affairs> diakses pada tanggal 04 September 2016

<http://unamid.unmissions.org/water-and-sanitation-0> diakses pada tanggal 05 September 2016

<http://unamid.unmissions.org/un-volunteers> diakses pada tanggal 05 September 2016

<http://endgenocide.org/unamid-scandal-misses-matters-people-darfur/> diakses pada tanggal 10 September 2016